

**PENGEMBANGAN PULAU KECIL PERBATASAN
(KAJIAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN PADA PULAU LIRANG)**

Femtsy Kour

*#Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Hein Namotemo.
Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I, Tobelo – Halmahera Utara 97762
E-mail: kourfemtsy@gmail.com*

ABSTRAK

Salah satu pulau kecil yang pantas mendapat perhatian penuh oleh pemerintah adalah Pulau Lirang. Pulau Lirang memiliki potensi perikanan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan oleh nelayan, dan sangat penting bagi pengembangan sosial ekonomi. Letak kawasan perbatasan Lirang ini cenderung terisolasi dari berbagai keterbatasan-keterbatasan seperti terbatasnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi, listrik, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil yang tepat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan permasalahan yang dimiliki daerah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi sosial masyarakat Pulau Lirang menggunakan metode deskriptif, menganalisis kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, serta merumuskan strategi pengembangan Pulau Lirang menggunakan metode analisis kebijakan publik (Dunn, 1994) dan analisis SWOT. Kondisi sosial di kawasan perbatasan Lirang masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya sumberdaya manusia, rendahnya infrastruktur wilayah dan infrastruktur perikanan. Beberapa kebijakan yang turut mendukung pengembangan Pulau Lirang sebagai Pulau kecil perbatasan antara lain: (a) Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah Negara; (b) Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; (c) Meningkatnya kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; (d) Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemerintahan dan perikanan; (f) Meningkatnya kualitas sosial masyarakat perbatasan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Pulau Lirang

Rumusan strategi yang sangat penting dalam pengembangan Pulau Lirang adalah: (a) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan; (b) Optimalisasi usaha di bidang perikanan dan maksimalkan pengembangan wilayah; (c) Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, dan keamanan dengan negara tetangga.

Kata kunci : *Kawasan Perbatasan, Sosial, Kebijakan*

ABSTRACT

Lirang Island is one of the small island on Moluccas that deserve full attention by the government is Lirang Island. Its fisheries potential can be used by fisherman and it can be developed in socio-economic area. Lirang's border area was isolated from education, health, transportation infra structure, electricity, and telecommunication. Therefore it was necessary have a proper management and development of small islands in accordance with the potential, characteristics, and problems of the area. The aim of this reseach are to analyze Lirang's social-community condition using descriptive method; to analyze border area development policy, and formulate Lirang's development strategy using public policy analysis and SWOT analysis. Social condition in Lirang's border area was too low. This can be seen from the low human resources, low regional infrastructure and fishery infrastructure. Some policies that support development of Lirang island as a small island border were: (a) Realization of integrity and sovereignty territory marked bythe clarity and firmness of boundaries State; (B) Declining illegal activities and maintain the environment in border areas; (C)people service quality increase with Social Welfare Problems; (D) Increasing the quality of government and fishery infrastructure facilities; (F) Social quality increase of border communities marked by declining number of poor people in Lirang Island. The formulation of a very important strategy to develop Lirang Island were: (a) to increase the guidance and counseling to the community in the border area; (B) Optimizing fisheries business and maximizing regional development; (C) Enhance cooperation in social development, and security with neighboring countries.

Keywords : *Keywords: Border Area, Social, Policy*

1. Pendahuluan

Kehidupan sosial di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di Negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di

bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang sosial dan ekonomi, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian Negara

tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa (Far-Far, 2010).

Syamironaldo, 2010 mengatakan bahwa daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal disebabkan antara lain: lokasinya yang relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan, langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan.

Pulau Lirang adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di sebelah barat Pulau Wetar dan berbatasan dengan Negara RDTL (Republik Demokratik Timor Leste). Di kawasan perbatasan Pulau Lirang, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di Negara RDTL. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya ke Negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan (DKP MBD, 2010).

Visi pengembangan kawasan perbatasan RI pada dasarnya adalah menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan lingkungan dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat berbasis karakteristik lokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah (Haryono, 2007). Pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang merupakan prioritas penting yang perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran pembangunan dan keutuhan wilayah tersebut dan NKRI. Salah satu masalah pokok yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah kesenjangan pembangunan daerah pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan perbatasan yang masih jauh tertinggal.

Berbagai isu dan permasalahan yang berkembang di wilayah perbatasan Maluku Barat Daya berbeda dengan wilayah lain di mana bentangan kawasan perbatasan yang ada sangat luas dengan tipologi perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, kawasan yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, sebuah Negara baru yang tingkat kesejahteraannya saat ini tidak jauh berbeda, namun memiliki potensi berkembang di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat Pulau Lirang dan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang, serta rumusan strategi pengembangan Pulau Lirang.

Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas menjadi hal menarik untuk dikaji, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan melihat kondisi sosial dan kebijakan pengembangan pada kawasan perbatasan Lirang dan merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan Pulau Lirang sebagai pulau kecil perbatasan.

2. Tinjauan Pustaka

Perbatasan Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara atau dalam terminologi pemerintah kawasan perbatasan merupakan "beranda depan NKRI". Perbatasan suatu Negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

2.1. Kawasan Perbatasan Di Indonesia

Kawasan perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu Negara. Secara geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga. Di darat Republik Indonesia berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste. Pada kawasan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Keberadaan pulau-pulau kecil Perbatasan berperan strategis dengan batas wilayah Negara (Bappenas, 2008).

2.2. Kawasan Perbatasan Di Maluku

Kawasan perbatasan dengan Negara Timor Leste dan Australia di Propinsi Maluku merupakan kawasan perbatasan laut. Kawasan ini mencakup 17 (tujuh belas) wilayah administrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat yaitu : 1) Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, 2) Kecamatan Lemola, 3) Kecamatan Pulau-pulau Babar, 4) Kecamatan Tanimbar Selatan, 5) Kecamatan Tanimbar Utara, 6) Kecamatan Selaru, 7) Kecamatan Wer Tamrian, 8) Kecamatan Wer Maktian, 9) Kecamatan Yaru, 10) Kecamatan Wuar Labobar, 11) Kecamatan Nirunmas, 12) Kecamatan Kormomolin, 13) Kecamatan Mdonia Hiera, 14) Kecamatan Babar Timur, 15) Kecamatan Moa Lakor, 16) Kecamatan Damer, dan 17) Kecamatan Wetar.

Isu kawasan yang harus diberi perhatian khusus di Kawasan Perbatasan Maluku, yaitu:

1. Kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan
2. Keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah
3. Pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal.

4. Rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

2.3. Masalah Kawasan Perbatasan Di Maluku

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan ini dapat dilihat ke dalam tiga aspek, yaitu aspek delimitasi dan demarkasi batas, aspek kesenjangan wilayah, dan aspek politik, hukum, dan keamanan.

1. Aspek deliniasi dan demarkasi batas
 - Belum disepakatinya beberapa segmen garis batas laut
2. Aspek kesenjangan wilayah
 - Rendahnya aksesibilitas yang menghambat tumbuhnya perekonomian kawasan untuk menanamkan modalnya.
 - Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi
 - Penyediaan sarana dan prasarana dasar yang belum memadai
 - Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan
3. Aspek politik, hukum, dan keamanan
 - Terjadinya kegiatan penyelundupan dan pencurian hasil-hasil laut
 - Keterbatasan sarana dan prasarana keamanan

3. Metode Penelitian

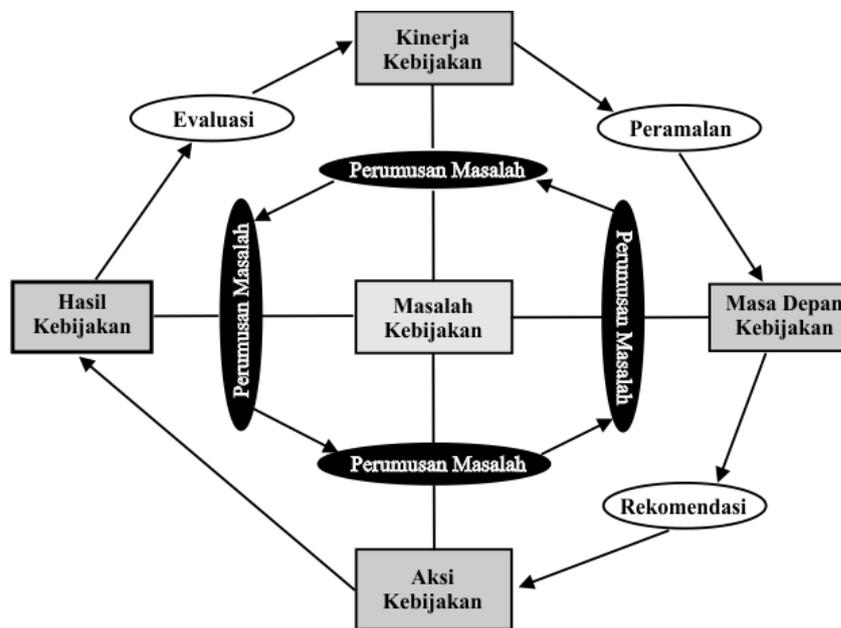
1. Analisis Deskriptif

Variabel analisis kondisi sosial masyarakat perbatasan dapat dianalisis dengan analisis deskriptif yang berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan yang terjadi di kawasan perbatasan.

2. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Lirang dapat dianalisis dengan kebijakan publik Dunn (1994). Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Proses analisis kebijakan public

3. Analisis SWOT

Berbagai persoalan, baik internal maupun eksternal yang ada dan di temui di lokasi penelitian, akan di analisis untuk mendapatkan gambaran dalam rangka merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan. Pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (Rangkuti, 2006). Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisisnya yaitu:

1. Pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penilaian

skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:

- a. Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari 4x4, urutan 2 nilainya 12 dari 3x4, dan terendah nilai 4 dari 1x4) lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4.
- b. Masing-masing nilai situasi tersebut di bagi dengan total nilai SP x K

2. Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) - 4 (tinggi) untuk kekuatan dan peluang, sedangkan skala 4 (rendah) -1 (tinggi) untuk kelemahan dan ancaman, namun karena tidak ada pembandingan, maka nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi (misalnya skala 4 untuk peluang yang paling utama).
3. Nilai tertinggi dari bobot kali peringkat adalah 1-2 (kuat) dan 0-1 (lemah).

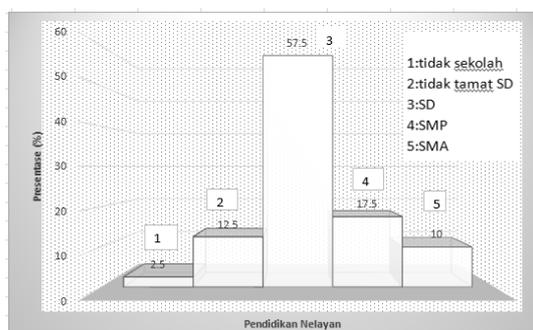
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Sosial Masyarakat

Kendala sosial utama dalam pengelolaan perikanan menurut Widodo (2006) dalam Ezauw, 2009 adalah bahwa masyarakat dan perilakunya tidak mudah ditransformasikan. Keluarga dan komunitas nelayan mungkin tidak akan bersedia pindah ke pekerjaan lainnya, atau ke tempat yang jauh dari rumah mereka bila terjadi surplus kapasitas dalam perikanan atau usaha yang sementara mereka lakukan, meskipun kualitas hidup mereka mengalami penurunan sebagai akibat sumber daya yang menipis atau rusak.

Kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Hal ini tergambar dari tingkat pendidikan formal dan kemampuan skil nelayan yang ada. Dari 40 orang nelayan (responden) yang diwawancarai, yang berpendidikan Sekolah Dasar 23 orang (57,5%), Sekolah Menengah Pertama 7 orang (17,5%), Pendidikan Sekolah Menengah Atas 4 orang (10%), yang tidak menamatkan Sekolah Dasar 5 orang (12,5%), yang tidak sekolah memiliki presentase terendah (2,5%) hanya 1 orang.

Berdasarkan sebaran tingkatan pendidikan responden, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Tingkat pendidikan nelayan pulau Lirang

4.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sebagian besar penduduk Pulau Lirang merupakan pelarian dari Timor Leste dan Pulau Wetar. Data penduduk Pulau Lirang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data penduduk pulau Lirang tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Pulau Lirang	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Laki-laki	677	49,89
2.	Perempuan	680	50,11
Jumlah		1.357	100

Sumber : Kantor desa Lirang, diolah

4.3. Mata Pencaharian

Umumnya mata pencaharian penduduk Lirang yaitu petani dan nelayan. Sektor pertanian hanya sebagai tambahan bagi kebutuhan sehari-hari sedangkan kegiatan melaut merupakan prioritas utama bagi nelayan Lirang. Mata pencaharian penduduk Lirang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. Mata pencaharian penduduk Lirang

No.	Jenis Pekerjaan	Pulau Lirang	
		Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Nelayan dan Petani	294	85,47
2.	PNS	23	6,69
3.	Wiraswasta	27	7,84
Jumlah		344	100

Sumber : Data primer, diolah

4.4. Agama

Mayoritas penduduk Lirang memeluk agama Kristen Protestan. Hal ini juga tercermin dari data nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Tercatat sebanyak 95,72% dari total masyarakat memeluk agama Kristen Protestan. Sisanya yaitu sebanyak 4,28% memeluk agama Islam.

Tabel 3. Distribusi Agama yang Dianut Masyarakat Lirang

Agama	Kristen	
	Protestan	Islam
Jumlah	1.299	58
%	95,72%	4,28%

Sumber: Data primer, diolah

4.5. Infrastruktur Sosial

4.5.1. Infrastruktur Pendidikan

Kecukupan fasilitas pendidikan formal sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan penduduk. Di Pulau Lirang terdapat fasilitas pendidikan dari tingkat SD

sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berstatus negeri. Distribusi jumlah sekolah, siswa dan guru menurut klasifikasinya di Pulau Lirang dinyatakan pada Tabel 4. Jumlah infrastruktur sekolah untuk tingkatan SMK secara khusus, menunjukkan bahwa pembangunannya masih harus dilakukan karena alokasi penggunaan ruang belajar masih secara bersama dengan pendidikan tingkat SMP.

Tabel 4. Jumlah sekolah, siswa dan guru di pulau Lirang

No.	Nama Desa	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMK	SD	SMP	SMK	SD	SMP	SMK
1.	Ustutun	1	1	1	147	95	32	7	8	5
2.	Manoha	1	-	-	97	-	-	6	-	-
Jumlah		2	1	1	244	95	32	13	8	9

Sumber : Data lapangan, 2013

4.5.2. Infrastruktur Kesehatan

Masyarakat Pulau Lirang hanya memiliki satu buah puskesmas yang terletak di Ustutun. Jumlah pegawai pada puskesmas Ustutun 5 orang, jika dibandingkan dengan penduduk Pulau Lirang (1.357 orang) maka dengan kapasitas peralatan dan jumlah medis yang terbatas tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Masalah yang sering dialami masyarakat Lirang adalah karena faktor biaya, jarak dan transportasi. Meskipun sudah ada puskesmas pembantu, namun pada kenyataannya belum semua desa/masyarakat terlayani dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Pulau Lirang untuk melakukan pengobatan ke Negara tetangga (Atauro/Dili) mengingat jarak yang sangat dekat dan dapat dijangkau dengan perahu nelayan.

4.5.3. Kondisi Perumahan

Sebagian besar rumah masyarakat Lirang termasuk dalam kategori non permanen. Dalam kategori rumah non permanen ini, jenis lantai yang umum dimiliki adalah lantai tanah, jenis dinding rumah adalah terbuat dari papan, bambu, atau rumput alang-alang atau daun kelapa, dan atap rumah terbuat dari rumput alang-alang dan daun kelapa.

4.5.4. Sarana Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Lirang hanya dapat memanfaatkan sumur galian yang dikembangkan melalui swadaya masyarakat. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan jumlah sumur galian yang ada di Pulau Lirang berjumlah 18 unit.

Sumber air bersih ini selalu dimanfaatkan untuk seluruh kebutuhan, baik untuk air minum, mandi, maupun cuci. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan air minum, sebenarnya kualitas air bersih tidak terlalu baik digunakan karena umumnya air bersih dari sumur galian ini adalah payau. Namun demikian, kondisi yang sangat terbatas ini tetap menjadi pilihan utama karena tidak ada sumber air bersih lainnya di Pulau Lirang.

4.5.6. Infrastruktur Transportasi

Pada aspek transportasi, sebagai wilayah kepulauan sarana dan prasarana transportasi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka memperpendek rentang kendali, meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Infrastruktur transportasi darat meliputi (jalan, jembatan dan angkutan penyeberangan), dan transportasi laut (kapal, pelabuhan) di Pulau Lirang, masih sangat terbatas.

Jenis jalan yang berkerikil di Pulau Lirang sepanjang 6 km, jenis jalan tanah sepanjang 4 km, dan jenis jalan aspal yg menghubungkan Ustutun dengan Manoha sepanjang 1 km. Transportasi laut yang melayani hubungan antar pulau Lirang dan ibukota Propinsi, ibukota Kabupaten adalah kapal-kapal perintis dengan ukuran 425 GT, kapal-kapal pelayaran nusantara yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun perseorangan.

Sesuai dengan kuantitas armada pelayaran yang beroperasi di wilayah perbatasan, khusus di Pulau Lirang dan sekitarnya, belum sepenuhnya dapat mengatasi persoalan transportasi laut. Pelabuhan laut yang berada di Pulau Lirang belum difungsikan karena letaknya pada perairan dangkal dan tidak strategis untuk tambatan kapal dengan *tonnage* yang lebih besar.

4.6. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Pulau Lirang

4.6.1. Masalah Kebijakan

Berikut ini disajikan permasalahan pembangunan kabupaten MBD antara lain:

- a. Masalah pemerintahan umum:
 - Rendahnya kapasitas daerah baik keuangan, sumberdaya aparatur, maupun organisasi
 - Belum optimalnya peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan akselerator pembangunan
 - Masih rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
 - Kondisi ibukota kabupaten kurang memadai sebagai pusat pelayanan masyarakat tingkat kabupaten
- b. Masalah prasarana dan sarana
 - Belum memadainya prasarana transportasi bagi pendukung aktifitas masyarakat
 - Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan (jaringan jalan dan jembatan, pelabuhan laut, dan udara)
 - Belum terbangunnya sistem jaringan ekonomi antara kampung-kampung dengan pusat-pusat kecamatan sebagai pusat kegiatan ekonomi, mengakibatkan terbatasnya aksesibilitas
 - Rendahnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
 - Rendahnya kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
 - Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana ketenaga kelistrikan

- Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih
 - Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
 - Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman
 - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan
- c. Masalah ekonomi
- Rendahnya ketahanan pangan masyarakat
 - Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi
 - Rendahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan ekonomi masyarakat
 - Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan
 - Rendahnya akses terhadap informasi pasar termasuk promosi potensi unggulan daerah guna menarik investor
 - Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pasar
 - Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dapat mengangkat kehidupan ekonomi pedesaan
 - Belum meratanya pembangunan di ibukota kecamatan dan kawasan-kawasan strategis untuk merangsang pertumbuhan kawasan
- d. Masalah sosial budaya
- Tingginya jumlah angka pengangguran dan kemiskinan, akibat rendahnya tingkat pendidikan
 - Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
 - Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pendidikan
 - Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
 - Kebiasaan dan pola pikir masyarakat yang cenderung sulit menerima perubahan
 - Upaya-upaya menggali dan memanfaatkan budaya lokal untuk mendukung pembangunan belum optimal
- e. Masalah Perbatasan
- Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan Negara tetangga
 - Maraknya pencurian sumberdaya alam di wilayah perbatasan
 - Tingginya sirkulasi barang dan jasa di wilayah perbatasan
 - Relatif masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai di wilayah perbatasan
- 4.6.2. Hasil Kebijakan dan Kinerja Kebijakan**
1. Meningkatnya kapasitas daerah tertinggal, terluar, dan terdepan
 - Mempercepat penyelesaian garis batas antar Negara dengan Negara tetangga
 - Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi masyarakat dan pendapatan daerah
 - Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan sarana dan prasarana
 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
 - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
 3. Meningkatnya kualitas pelayanan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)
 - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
 - Program pembinaan anak terlantar
 - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - Program peningkatan kesempatan kerja
 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan
 - Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi talud
 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
 - Program pendidikan anak usia dini
 - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - Program pendidikan menengah
 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - Program manajemen pelayanan pendidikan
 - Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan sarana puskesmas

4.7. Kinerja Kebijakan

Indikator kinerja memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik.

Dari keseluruhan kebijakan program pembangunan yang ada, tidak semua program dapat terlaksana, hanya 35 % program kerja yang terlaksana sesuai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah, dan merupakan faktor

penghambat bagi daerah di dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Banyak kendala yang dialami oleh pemerintah MBD dalam pencapaian kinerja, masih ada peluang besar yang perlu dikembangkan di keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten MBD dan terlebih khusus di Pulau Lirang sebagai kawasan perbatasan. Peluang-peluang tersebut dapat dilihat pada analisis SWOT berikut ini:

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (*Strengths*)

1. Pulau Lirang merupakan salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan RI dengan RDTL
2. Memiliki potensi sumberdaya alam seperti kebun kelapa, jagung, perternakan, potensi kelautan dan perikanan yang cukup melimpah
3. Tersedianya jumlah nelayan yang memadai
4. Adanya kearifan lokal (sasi)
5. Memiliki kebudayaan yang unik dan sama dengan Negara tetangga
6. Memiliki POS Angkatan Laut dan BKO (Bawah Kendali Operasi)

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL
2. Kualitas sumberdaya nelayan rendah
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
4. Rantai/jaringan pasar belum baik
5. Terbatasnya kelembagaan dan aparat keamanan
6. Rendahnya prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, kelistrikan, transportasi darat dan laut, pertahanan keamanan dan prasarana ekonomi

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (*Opportunities*)

1. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Negara tetangga
2. Memiliki sumberdaya pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan yang dapat dikelola dan diekspor ke luar pulau bahkan ke Negara tetangga
3. Memiliki tempat-tempat pariwisata yang cukup strategis
4. Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Ancaman (*Threats*)

1. Masalah garis batas zona ekonomi eksklusif
2. Infiltrasi dan imigrasi gelap melalui kegiatan pariwisata
3. Ketidakstabilan persediaan dan harga barang keperluan masyarakat
4. Dampak negatif akibat kurangnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan sarana prasarana tangkap

Analisis faktor strategis internal yang tujuan analisisnya menilai prestasi/kinerja yang merupakan faktor kekuatan dan kelemahan yang ada, untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis faktor strategi internal dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan

Faktor-faktor Internal	Strategi	SP	K	SP x K	Bobot
Kekuatan (<i>Strengths</i>)					
1. Pulau Lirang merupakan salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan RI dengan RDTL		4	4	16	16/76=0,2
2. Memiliki potensi sumberdaya alam seperti kebun kelapa, jagung, perternakan, potensi kelautan dan perikanan yang cukup melimpah		4	4	16	16/76=0,2
3. Tersedianya jumlah nelayan yang memadai		3	4	12	12/76=0,1
4. Adanya kearifan lokal (sasi)		2	4	8	8/76=0,1
5. Memiliki kebudayaan yang unik dan sama dengan Negara tetangga		4	4	16	16/76=0,2
6. Memiliki POS Angkatan Laut dan BKO (Bawah Kendali Operasi)		2	4	8	8/76=0,1
Total				76	0,9
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)					
1. Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL		1	4	4	4/52=0,07
2. Kualitas sumberdaya nelayan rendah		2	4	8	8/52=0,1
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap		2	4	8	8/52=0,1
4. Rantai/jaringan pasar belum baik		2	4	8	8/52=0,1
5. Terbatasnya kelembagaan dan aparat		2	4	8	8/52=0,1
6. Rendahnya prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, kelistrikan, transportasi darat dan laut, pertahanan keamanan dan prasarana ekonomi		1	4	4	4/52=0,07
Total				40	0,54
Faktor-faktor Peluang dan Ancaman					
Faktor-faktor Eksternal	Strategi	SP	K	SP x K	Bobot

Peluang (Opportunities)

1. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Negara tetangga	4	4	16	16/92=0,1
2. Memiliki sumberdaya pertanian, perkebunan, perikanan dan perikanan yang dapat dikelola dan diekspor ke luar pulau bahkan ke Negara tetangga	3	4	12	12/92=0,1
3. Memiliki tempat-tempat pariwisata yang cukup strategis	4	4	16	16/92=0,1
4. Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar	4	4	16	16/92=0,1
Total		60	0,4	

Ancaman (Threats)

1. Masalah garis batas zona ekonomi eksklusif	1	4	4	4/40=0,1
2. Infiltrasi dan imigrasi gelap melalui kegiatan pariwisata	2	4	8	8/40=0,2
3. Ketidak stabilan persediaan dan harga barang keperluan masyarakat	2	4	8	8/40=0,2
4. Dampak negatif akibat kurangnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan sarana prasarana tangkap	1	4	4	4/40=0,1
Total		24	0,6	

4.8. Strategi Pengembangan

Hasil analisis yang menunjukkan adanya interaksi antara seluruh komponen lingkungan internal dan eksternal menghasilkan strategi-strategi pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang. Hasil analisis ini menunjukkan sedikit terdapat 16 strategi pengembangan, sebagaimana di bawah ini:

STRATEGI (S-O)

1. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial dan ekonomi
2. Optimalisasi usaha di bidang penangkapan ikan, dan maksimalkan pengembangan wilayah
3. Meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana penangkapan ikan dan pelatihan bagi nelayan
4. Penetapan undang-undang perbatasan Negara

STRATEGI (S-T)

1. Meningkatkan ketahanan wilayah nasional
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

percepatan pertumbuhan ekonomi secara selektif dan bertahap

3. Pemberdayaan kelembagaan adat masyarakat perbatasan dalam fungsi pengawasan
4. Membangun sarana dan prasarana pengawasan serta keamanan di kawasan perbatasan Lirang

STRATEGI (W-O)

1. Percepatan penyelesaian tapal batas
2. Peningkatan sumberdaya nelayan melalui pembinaan, pelatihan dan magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi
3. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap
4. Membangun jaringan pemasaran guna mendekatkan pasar dengan sumber produksi
5. Memperbanyak sarana dan prasarana sosial dan ekonomi maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana

STRATEGI (W-T)

1. Membangun pos-pos keamanan di kawasan perbatasan dan peningkatan frekuensi patroli keamanan di kawasan perbatasan
2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan

4.9. Aksi Kebijakan

Aksi kebijakan yang dimaksudkan adalah arahan-arahan pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang yang berbasis pada seluruh rumusan strategi yang dihasilkan di atas.

Arahan-arahan yang terkait dengan strategi pemanfaatan potensi atau kekuatan dalam memanfaatkan peluang yang ada meliputi empat strategi dengan berbagai arahan pengembangannya. *Pertama*, Optimalisasi usaha di bidang penangkapan ikan, dan maksimalkan pengembangan wilayah, melalui peningkatan kapasitas usaha penangkapan ikan dengan menambah alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumberdaya yang ada, dan mengembangkan wilayah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, maupun sosial dan budaya lokal.

Kedua, meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana penangkapan ikan dan pelatihan-pelatihan bagi nelayan dan melalui dukungan sarana usaha penangkapan ikan sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi yang ada, ataupun melalui dukungan modal usaha. *Ketiga*, meningkatkan kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya dan keamanan dengan Timor Leste. Arahnya adalah pengembangan kawasan perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerja sama dengan Negara tetangga. Kesepakatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan MBD dengan Timor Leste (MOU) perlu

direalisasikan dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. *Keempat*. Penetapan undang-undang perbatasan Negara bertujuan untuk menekankan pengembangan wilayah perbatasan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional.

Kelompok arahan pengembangan lainnya yang didasarkan pada strategi penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman atau tantangan. Hasil ini memberikan konsekuensi terhadap beberapa kelompok arahan pengembangan. *Pertama*. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara selektif dan bertahap. Arahannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Maluku Barat Daya. *Kedua*. Pemberdayaan kelembagaan adat masyarakat perbatasan dalam fungsi pengawasan. Arahannya adalah melibatkan kelembagaan yang ada di kawasan perbatasan Lirang, baik dalam pelatihan-pelatihan maupun pelaksanaan program-program terkait kawasan perbatasan. *Ketiga*. Meningkatkan ketahanan wilayah nasional dengan arahan peningkatan ketahanan wilayah nasional masyarakat di perbatasan yang jarang berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsa dan seNegaranya karena keterisoliran wilayah berpotensi mengalami penurunan wawasan kebangsaan dan rasa bela Negara. *Keempat*. Membangun sarana dan prasarana pengawasan serta keamanan di Kawasan perbatasan Lirang. Arahan pentingnya adalah memperketat pengamanan dan pengawasan terhadap para pelaku penyelundupan dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya di wilayah perbatasan.

Kelompok arahan pengembangan yang berbasis pada upaya mereduksi kelemahan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang. *Pertama*. Percepatan penyelesaian tapal batas, dengan arahan mempertegas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia. *Kedua*. Peningkatan sumberdaya nelayan melalui pembinaan, pelatihan dan magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi teknologi dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia. *Ketiga*. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap seperti pasar, dermaga/jeti, pangkalan pendaratan ikan (PPI), pabrik es, *cold storage* dan air bersih dalam menunjang proses dan kelancaran usaha perikanan tangkap. *Kempat*. Membangun jaringan pemasaran guna mendekatkan pasar dengan sumber produksi, disamping peningkatan sarana transportasi antar pulau melalui laut dan darat.

Kelompok arahan pengembangan dengan mereduksi kelemahan sambil menghindari ancaman. *Pertama*. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan agar meningkatkan rasa kecintaan dan bela Negara terhadap bangsa. *Kedua*. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan

perbatasan. Arahannya adalah memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sarana dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada.

Seluruh hasil yang ditunjukkan sampai aksi kebijakan ini, menunjukkan bahwa pemerintah haruslah lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan di bidang pertahanan keamanan, memperkuat sumberdaya perekonomian, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan percepatan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI dan Timor Leste.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang Pengembangan Pulau Kecil Perbatasan (Kajian Sosial dan Kebijakan Pada Pulau Lirang) memberikan beberapa rumusan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi sosial di kawasan perbatasan Lirang masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah (tingkat pendidikan formal nelayan rendah), minimnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terdapat rumah tidak layak bagi penduduk, minimnya sarana air bersih, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi.
2. Beberapa kebijakan yang turut mendukung pengembangan Pulau Lirang sebagai Pulau kecil perbatasan, dengan sasaran-sasaran antara lain: (a) Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah Negara; (b) Menurunnya kegiatan *illegal* dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; (c) Meningkatnya kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; (d) Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dan perikanan; (e) Meningkatnya kualitas sosial masyarakat perbatasan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Pulau Lirang
3. Rumusan strategi yang sangat penting dalam pengembangan Pulau Lirang adalah: (a) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan; (b) Optimalisasi usaha di bidang perikanan dan maksimalkan pengembangan wilayah; (c) Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, dan keamanan dengan negara tetangga.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu meninjau ulang berbagai kerjasama perbatasan dengan negara tetangga, baik secara substantif maupun fungsional sesuai perkembangan kawasan perbatasan dan kepentingan nasional yang dinamis
2. Perlunya penelitian lanjutan untuk menjawab indikator-indikator dalam mendukung

pemantauan/monitoring secara sistematis dan fungsinya untuk mengoreksi, mengecek program yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan di kawasan perbatasan

DAFTAR PUSTAKA

- _____.1994. Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik MenurutWilliamDunn.<http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html>. [08-03-2013]
- _____.2008.<http://www.bappenas.go.id/node/108/828/kawasan-perbatasan-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengelolaan-kawasan-perbatasan-antarnegara-di-indonesia/> [31-01-2013]
- _____.2010.<http://syamironaldo.blogspot.com/2010/06/pertahanan-dan-keamanan-ri.html>. [05-11-2013]
- Abrahamsz, J., 2007. Analisis Lingkungan (SWOT) dan Analisis Strategis (TOWS).
<http://www.dkp.go.id/http://www.go.id/>. 27 November 2007: 8 hal. [12-12-2013]
- Abrahamsz dkk, 2006. Profil Investasi Lirang. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- DKP MBD, 2010. Data Base Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Serta Sosial Ekonomi Masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Barat daya.
- Ezauw, A., 2009. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Ambon.
- Far-far, R., 2010. Model Pencegahan Perikanan Ilegal Melalui Pengelolaan Pulau- pulau Terluar: Pulau Lirang, Wetar dan Lirang di Provinsi Maluku. Disertasi. Bogor.
- Haryono, D., Indo. 2007. Konflik perbatasan negara di kawasan asia pacifik.
<http://penataanruang.pu.go.id/taru/Makalah/PulauKecil.doc>, [05-05-2013]
- Rangkuti, F., 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk menghadapi Abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.